



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

REVIU RENCANA AKSI *Tahun 2023*



☎ 021-31966163

🌐 ptun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [ptun.jakarta.117](https://www.instagram.com/ptun.jakarta.117)

✉ ptun.jakarta@gmail.com



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Rencana Aksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2023 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Aksi menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Aksi telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Aksi ini.

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

REVIU SHEET
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Reviu Rencana Aksi Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

No.	Koreksi/Saran/Masukan	Keterangan
1.	Dokumen rencana aksi telah menyesuaikan dengan format Rencana Aksi Lampiran SK SEKMA Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan dilengkapi Rencana Aksi Monitoring dan Evaluasi/Pengukuran Kinerja Internal Secara Berkala sesuai SEKMA 878/SEK/SK/VII/2022	Penambahan
2.	Perubahan indikator kinerja tambahan	Dikoreksi

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001



**Reviu Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Tahun 2023**

Reviu Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mewujudkan Visi yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung”

dengan Misi:

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (*yusticia banlance*).
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir:

REVIU RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGKAT BANDING TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabilitas	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%	90%	90%	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	35%	35%	35%	35%
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	80%	80%	80%	80%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu	√				Terdatanya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Dana bersumber dari biaya proses pihak berperkara <ul style="list-style-type: none"> • DIPA 01 (layanan dukungan manajemen) • DIPA 05 (prodeo)
2.	Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu	√				Teridentifikasi permasalahan penghambat penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
3.	Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu	√	√	√	√	Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
								Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
4.	Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP	√	√	√	√	BAS selesai tepat waktu	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
5.	Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu	√	√	√	√	Minutası Perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
6.	Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
7.	Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan	√	√	√	√	Terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
								Badan Urusan Administrasi	
8.	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 3 bulan	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
9.	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	Terdata jumlah perkara yang lebih dari 3 bulan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
10.	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
11.	Memutus perkara tidak melebihi 3 bulan	√	√	√	√	Perkara yang diputus	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
12.	Menyusun Putusan Perkara Tingkat Banding yang berkualitas	√	√	√	√	Putusan perkara tingkat banding yang berkualitas	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
13.	Mendata Perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama	√	√	√	√	Terdatanya perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
14.	Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat	√				Terbentuknya Tim Evaluasi	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
15.	Menyusun job description tim evaluasi kepuasan masyarakat	√				Job Description Tim IKM	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
16.	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat	√				Jadwal dan Perangkat IKM	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
								Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
17.	Melaksanakan IKM	√	√	√	√	Kuesioner IKM	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
18.	Mendata dan merekap hasil IKM	√	√	√	√	Data Hasil IKM	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
19.	Menyusun Laporan Hasil IKM	√	√	√	√	Laporan IKM	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
20.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan tinjauan manajemen	√	√	√	√	Laporan IKM	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
								Badan Urusan Administrasi	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	100%	100%	100%	100%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Membuat Berita Acara Sidang setelah putusan dibacakan	√	√	√	√	BAS	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Dana bersumber dari biaya proses pihak berperkara • DIPA 05 (prodeo)
2.	Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
3.	Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP dalam 1 hari setelah pembacaan putusan	√	√	√	√	Amar Putusan Putusan di SIPP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
4.	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (<i>e-doc</i>)	√	√	√	√	<i>e-doc</i> Salinan Putusan	Program Penegakan dan	Peningkatan Manajemen	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
							Pelayanan Hukum	Peradilan Tata Usaha Negara	
5.	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil Evaluasi	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

No.	Sasaran Strategis Tambahan	Indikator	Target			
			I	II	III	IV
1.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	a. Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi.	90%	90%	90%	90%
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	85%	85%	85%
4.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	a. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%	100%	100%	100%

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi ASN	√	√	√	√	Surat tugas untuk keikutsertaan ASN	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
2.	Hasil dari pelatihan dan pendidikan bagi satuan kerja		√	√	√	Aparatur Sipil Negara yang kompeten	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
3.	Membuat surat pengaduan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi ASN pada satuan kerja di bawah pengadilan tingkat banding		√	√	√	Diedarkan surat dari pengadilan tingkat banding kepada satuan kerja untuk mengirim nama nama peserta yang ditanda tangani oleh KPTTUN Jakarta	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
4.	Pengumpulan data para peserta bimbingan teknis dan sosialisasi beserta jumlahnya	√	√	√	√	Data para peserta bimbingan teknis dan sosialisasi	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan	


No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
								Badan Urusan Administrasi	
5.	Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi yang diselenggarakan pengadilan tingkat banding	√	√	√	√	Hasil bimbingan teknis dan sosialisasi	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
6.	Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi yang diselenggarakan pengadilan tingkat banding	√	√	√	√	Hasil bimbingan teknis dan sosialisasi	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
7.	Menerima surat tentang pengaduan	√	√	√	√	Hasil telaah surat pengaduan	Penegakan dan pelayanan hukum	Pelaksanaan telaah surat pengaduan di Panmud Hukum	
8.	Membentuk tim pemeriksa	√	√	√	√	SK Tim Pemeriksa	Penegakan dan pelayanan hukum	Persiapan kegiatan pemeriksaan	
9.	Pemanggilan pihak terperiksa	√	√	√	√	Laporan hasil pemeriksaan	Penegakan dan pelayanan hukum	Proses pemeriksaan terhadap pengaduan	
10.	Pengiriman laporan hasil pemeriksaan ke BAWAS MA RI	√	√	√	√	Bukti kirim laporan hasil pemeriksaan	Penegakan dan pelayanan hukum	Penyelesaian proses	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
								pemeriksaan pengaduan	
11.	Membuat SK tentang Hawasbid dan Hawasda	√				SK Hawasbid dan Hawasda	- Penegakan dan pelayanan - Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
12.	Menyusun matriks dan rencana pengawasan	√	√	√	√	Check List pengawasan dan surat tugas	- Penegakan dan pelayanan - Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
13.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Tingkat Pertama di	√	√	√	√	Pembinaan dan pengawasan	- Penegakan dan pelayanan	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta						- Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
14.	Menyusun laporan hasil pelaksanaan binwas	√	√	√	√	Laporan Hasil Pengawasan	- Penegakan dan pelayanan - Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
15.	Melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	√	√	√	√	Laporan Hasil Pengawasan	- Penegakan dan pelayanan - Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Pembinaan administrasi dan Pengelolaan	

No	Aksi/Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		I	II	III	IV				
							Keuangan Badan Urusan Administrasi		

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1001

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
			dilaksanakan sebagai pedoman tugas diseluruh satker se-wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta											
5.	Panitera Muda Perkara	Melaksanakan administrasi perkara dibidang tata usaha negara	Pemeriksaan, penelaahan kelengkapan dan registrasi berkas perkara masuk	PK Panitera Muda Perkara dengan Panitera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Panitera Muda Perkara
			Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Pengelolaan Administrasi Persidangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya pencatatan administrasi yang tertib		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6.	Panitera Muda Hukum	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan	Menyelenggarakan laporan urusan data perkara Pengadilan Tinggi TUN maupun Pengadilan Tinggi TUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama	PK Panitera Muda Hukum dengan Panitera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Panitera Muda Hukum
			Menyelenggarakan laporan urusan data statistik perkara Pengadilan Tinggi TUN maupun Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan tingkat pertama		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Menyelenggarakan laporan urusan pendokumentasian perkara Pengadilan Tinggi TUN maupun Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan tingkat pertama		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Menyelenggarakan urusan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum Perkara Pengadilan Tinggi TUN maupun Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan tingkat pertama		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Membuat dan menandatangani Berita Acara Persidangan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tinggi TUN Tingkat Pertama		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Menandatangani Putusan Perkara Tingkat Banding maupun Pengadilan Tinggi TUN sebagai Tingkat Pertama		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Mengunggah dokumen Persidangan pada aplikasi SIPP Tingkat Banding		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
7.	Panitera Pengganti	Membantu Hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya sidang, pengetikan putusan hingga minutasai	Membantu Hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya sidang, pengetikan putusan hingga minutasai	PK Panitera Pengganti dengan Panitera	100%	100%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	Panitera Pengganti

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi	Indikator Kinerja	Perjanjian Kinerja	Target	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
8.	Analis Hukum	Menyelesaikan Administrasi Persidangan	Mendaftarkan berkas masuk (Perkara Gugatan, Banding, Kasasi, PK)	PK Analis Hukum dengan Panitera Muda Perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Analis Hukum
			Pencatatan bukti pembayaran yang tertib dan rapih		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya semua pencatatan keluar masuknya biaya materai, redaksi dan leges		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya laporan PNBPN yang kemudian diserahkan kepada bendahara penerima		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
9.	Analis Hukum	Menyelesaikan Administrasi Persidangan	Terlaksananya laporan bulanan perkara gugatan	PK Analis Hukum dengan Panitera Muda Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Analis Hukum
			Terlaksananya laporan bulanan perkara banding		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya laporan perkara bulanan pada papan statistik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya rekapitulasi tahunan perkara gugatan, banding, kegiatan hakim, kegiatan panitera pengganti, pelayanan pengaduan dan informasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya pengarsipan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) Gugatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya pencatatan surat pengaduan masuk di buku register pengaduan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya pencatatan surat masuk dan surat keluar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya pengiriman email laporan perkara dan laporan bulanan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Terlaksananya pencatatan data surat kuasa ke dalam buku register		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Jakarta, 20 Desember 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 1222 /KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU SAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melakukan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Reviu SAKIP.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang.....

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU SAKIP PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Reviu SAKIP Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua.....

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2023

Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H.M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 1222/KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

TIM PENYUSUN REVIU SAKIP
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pembina	:	H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
2.	Penanggung Jawab	:	Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.
3.	Pengarah	:	YUSRAN IBERAHIM, S.H.
4.	Koordinator	:	Drs. MUHIDIN, M.H.
5.	Sekretaris	:	ONO HARYONO, S.E.
6.	Anggota	:	1. WAHYU SUPRAPTONO, S.IP 2. JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. 3. DARUL NAPIS, S.H 4. APEY TITI KUNDARTI, S.H 5. ELLY SETIO WARDANI, S.H 6. PATTIE OKTAVIATIE, S.H 7. AKHMAD IBNU ROMDON, S.E. 9. IIS YULITA TRISNAWATI K, S.E. 10. NURUL FADHILAH, S.H. 11. GURNITA NING KUSUMAWATI, S.H
7.	Sekretariat	:	1. NITUYU MENDROFA, S.H. 2. FIRMANSYAH, S.H 3. DWI HENNY FEBRIATI, S.H 4. MEYKE HERBITA SARI, S.M. 5. SARI MEILISNA, Amd 6. KARUNIA DWI PUTRI PARAMITA, A.Md. 7. SANTI GUSTIANI, S.E.

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 1327/KPT.TUN.W2-TUN/KP3.4.1/XII/2023

PENETAPAN REVIU DOKUMEN SAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
- Menimbang : a. Bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
b. Bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2024, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Kesatu : Menetapkan Reviu Dokumen SAKIP sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 Desember 2023



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1001



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,

Kecamatan Menteng

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

www.pttun-jakarta.go.id

Nomor : W2-TUN/1297 /OT.01.1/XII/2023

18 Desember 2023

Perihal : Undangan

Kepada Yth : 1. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN
Jakarta

2. Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN
Jakarta

3. Para Pejabat Struktural dan Fungsional
Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

4. Tim SAKIP/ Reviu SAKIP

Di-

Tempat

Dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak dalam acara Rapat Penetapan Reviu SAKIP,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023

Hari/tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Agenda : Pukul 13.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini,
Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330.

www.pttun-jakarta.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari : Rabu, 20 Desember 2023
Tanggal :
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Acara : Rapat Penetapan Reviu SAKIP Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2023
Peserta Rapat : *Terlampir dalam absensi*

Jalannya Rapat :

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Para Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional dan Tim SAKIP. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka untuk menetapkan Dokumen SAKIP yang telah di reviu setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi. Berikut adalah hal-hal yang disampaikan dalam rapat penetapan;

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 telah direviu dan ditetapkan pada hari ini tanggal 20 Desember 2023, direviu karena setelah dilakukannya monitoring dan evaluasi direkomendasikan untuk perbaikan matriks Rencana Kinerja agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SK Sekma 2049 tahun 2022;
2. Reviu Rencana Aksi Tahun 2023 ditetapkan pada hari ini, setelah dilakukannya monitoring, dilakukannya reviu karena matriks tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hari ini ditetapkan matriks Rencana Aksi Tahun 2023 sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu SK Sekma 2049 Tahun 2022;

Demikian notulen ini saya buat dan ditanda tangani oleh :

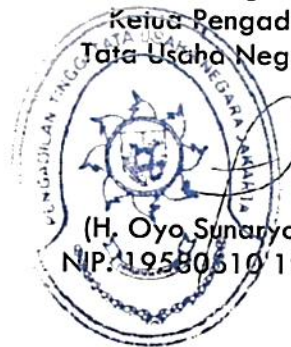
Notulis,

(Sari Meilisna)

NIP. 19900527 202012 2 003

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta,



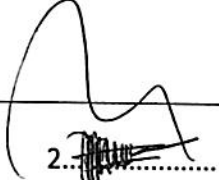

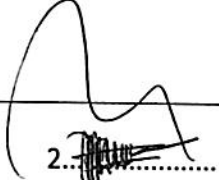
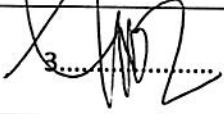

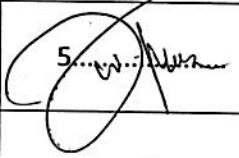
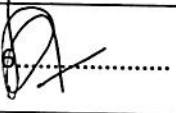



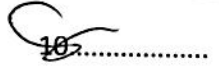
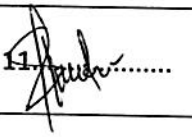
(H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.)

NIP. 19580510 198503 1 001

**ABSEN RAPAT
PENETAPAN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2023**

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Oyo Sunaryo	Ketua	1.....	
2	Amyanto	Hakam Tinggi		2..... 
3	Undang G.	— —	3..... 	
4	Jawo L.	Pan mud Perkam		4..... 
5	Wahyu Supriatno	Kabag Umum & Ker	5..... 	
6	Dandi N.	PP		6..... 
7	WENDESUN	Hakam Tinggi	7..... 	
8	A. Ibnu	Kasub TURT		8..... 
9	Nurul Farad'lh	APP	9..... 	
10	Sari Melisna	Pengelola Sistem Inr		10..... 
11	Santi Gusiani	Perencanaan	11..... 	
12				12.....
13			13.....	
14				14.....

DOKUMENTASI RAPAT
RABU, 20 DESEMBER 2023





☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com